

DEMOKRASI PANCASILA DALAM PANDANGAN MOHAMMAD HATTA: SEBUAH KONSEP YANG MULAI MENJAUH DARI AKARNYA

Anisya Hafsa Subekti

(Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret),
anisyaahafsa@student.uns.ac.id

Atha Candra Puspita

(Teknologi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret),
athacandra@student.uns.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji pandangan Mohammad Hatta mengenai implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia dan tantangan yang dihadapinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pemikiran Hatta tentang Demokrasi Pancasila serta menganalisis implementasi dan relevansinya dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer. Hatta meyakini bahwa demokrasi yang sehat harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Meskipun Pancasila sebagai dasar Negara mengandung nilai-nilai dasar yang kuat, praktik demokrasi saat ini sering kali terabaikan, mengakibatkan ketidakpuasan masyarakat dan mengurangi kualitas demokrasi. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur review untuk menganalisis 100 artikel ilmiah yang relevan, dan setelah seleksi, diperoleh sejumlah artikel yang menjadi fokus analisis. Hasil studi menunjukkan bahwa tantangan seperti politik dinasti, politik uang, rendahnya pendidikan politik, dan penyebaran informasi yang tidak akurat berkontribusi terhadap kemunduran demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk merefleksikan praktik Demokrasi Pancasila saat ini agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Hatta dan tujuan keadilan serta kesejahteraan bersama. Melalui penerapan prinsip-prinsip Pancasila yang inklusif, diharapkan demokrasi Indonesia dapat mengatasi tantangan tersebut dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik.

Kata Kunci: Mohammad Hatta, Demokrasi Pancasila.

Abstract

This article examines Mohammad Hatta's views on the implementation of Pancasila Democracy in Indonesia and the challenges it faces. The aim of this research is to explore Hatta's thoughts on Pancasila Democracy and to analyze its implementation and relevance in facing the challenges of contemporary democracy. Hatta believed that a healthy democracy should involve the active participation of the people and be oriented towards the welfare of the people. Although Pancasila as the foundation of the State contains strong basic values, current democratic practices are often neglected, resulting in public dissatisfaction and reducing the quality of democracy. This research used the literature review method to analyze 100 relevant scientific articles, and after selection, a few articles were obtained that became the focus of analysis. The results show that challenges such as dynastic politics, money politics, low political education, and inaccurate information dissemination contribute to the decline of Pancasila democracy. Therefore, it is important to reflect on the current practice of Pancasila Democracy to keep it in line with Hatta's values and the goals of justice and shared prosperity. Through the inclusive application of Pancasila principles, it is hoped that Indonesian democracy can overcome these challenges and increase public participation in the political decision-making process.

Keywords: Muhammad Hatta, Pancasila Democracy..

PENDAHULUAN

Demokrasi Pancasila merupakan konsep yang diusung sebagai dasar sistem pemerintahan di Indonesia. Konsep ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Mohammad Hatta sebagai salah satu tokoh pendiri bangsa, memiliki pandangan yang mendalam mengenai penerapan demokrasi dalam konteks

Pancasila. Dengan kata lain, demokrasi tidak hanya sekedar mekanisme politik, tetapi juga merupakan suatu cara hidup yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Demokrasi dalam pandangan Mohammad Hatta merupakan fondasi penting bagi negara Indonesia yang berdaulat dan merdeka. Sebagai salah satu tokoh proklamator, Hatta mengembangkan konsep demokrasi yang menyesuaikan dengan karakter masyarakat

Indonesia. Ia berkeyakinan bahwa nilai-nilai demokratis telah tumbuh dan berkembang dalam tradisi lokal, seperti permusyawaratan desa dan ajaran Islam, yang menciptakan rasa persaudaraan dan keadilan sosial. Hatta menekankan pentingnya kedaulatan rakyat yang bersifat bottom-up, berbeda dengan individualisme yang sering diasosiasikan dengan demokrasi Barat. Dalam konteks ini, pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat menjadi metode yang ideal untuk masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pemikiran Hatta tentang demokrasi menyimpan relevansi yang signifikan dalam situasi politik dan sosial Indonesia saat ini.

Hatta menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi. Ia percaya bahwa demokrasi yang sehat harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya elit politik. Demokrasi Pancasila seharusnya memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun kenyataannya, banyak masyarakat yang merasa terpinggirkan dari proses politik, sehingga mengurangi kualitas demokrasi itu sendiri (Suftiyadi, 2021). Hatta menunjukkan bahwa negara harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan sosial dan persatuan. Konsepnya menekankan bahwa kekuasaan tidak boleh terpusat pada segelintir individu atau kelompok, tetapi harus dikelola oleh rakyat secara kolektif. Dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, ia berharap dapat mencegah dominasi politik yang merugikan banyak pihak.

Pandangan Hatta mengenai Demokrasi Pancasila harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Seringkali kebijakan yang diambil lebih mengutamakan kepentingan politik jangka pendek daripada kepentingan jangka panjang masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara mengamalkan demokrasi saat ini dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, penting untuk melakukan refleksi terhadap praktik demokrasi Pancasila yang ada saat ini.

Meskipun ide-ide Hatta memiliki landasan yang kuat, realitas demokrasi Pancasila saat ini menunjukkan sejumlah tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah fenomena politik dinasti yang mengancam partisipasi rakyat dalam proses politik. Praktik ini mengakibatkan semakin sedikitnya ruang bagi individu yang berkualitas, tetapi tidak memiliki afiliasi keluarga politik untuk bersaing. Selain itu, politik uang yang merajalela dalam pemilu menciptakan ketidakadilan, sehingga partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan kian terabaikan. Tak hanya itu, rendahnya pendidikan politik di kalangan masyarakat membuat pemahaman tentang hak dan

tanggung jawab dalam sistem demokrasi menjadi terbatas. Akibatnya, masyarakat cenderung apatis dan tidak aktif dalam proses politik yang seharusnya melibatkan mereka.

Dampak dari tantangan-tantangan ini semakin diperburuk oleh era digital. Pentingnya teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu berdampak positif bagi demokrasi. Munculnya berita palsu atau hoaks dan polarisasi opini publik memberikan tantangan serius terhadap kualitas diskursus politik. Informasi yang tidak akurat dapat dengan cepat menyebar melalui media sosial, memperburuk situasi ketidakpercayaan di masyarakat. Individu sering kali terjebak dalam gelembung informasi, sehingga mengurangi pemahaman mereka tentang isu-isu politik yang seharusnya menjadi perhatian bersama. Hal ini menunjukkan bahwa ruang dialog yang seharusnya ada untuk musyawarah mulai tergantikan oleh emosi dan argumen yang tidak sehat. (Mudrikah et al., 2024).

Politik identitas juga menjadi tantangan besar dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini. Munculnya pendekatan berbasis identitas sering kali memicu ketegangan sosial. Ketika individu merasa terpinggirkan berdasarkan etnis, agama, atau pandangan politik tertentu, potensi untuk terjadinya konflik dapat meningkat. Politisi yang memanfaatkan identitas untuk mobilisasi dukungan justru memperlemah solidaritas sosial dan persatuan bangsa. Selain itu, fokus yang berlebihan pada politik identitas dapat mengalihkan perhatian masyarakat dari isu-isu pokok yang lebih mendesak, seperti kemiskinan dan pendidikan.

Hatta menegaskan demokrasi harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara karena membawa nilai-nilai fundamental yang harus diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila dalam Pancasila memberikan panduan bagi pengambilan keputusan dan etika politik. Dalam praktiknya, Pancasila mengedepankan musyawarah dan mufakat, serta menghormati hak asasi manusia. Hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi di Indonesia harus inklusif dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan kepentingan semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembentukan tata kelola pemerintahan yang baik.

Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan Mohammad Hatta mengenai demokrasi Pancasila dan menganalisis bagaimana implementasinya saat ini. Dengan memahami perspektif Hatta, diharapkan kita dapat memikirkan kembali arah dan substansi demokrasi Pancasila yang kita jalani sekarang.

METODE

Penelitian ini menggunakan salah satu metode yaitu metode studi literatur review. Literatur review merupakan analisis atau membandingkan berbagai sumber referensi terkait Demokrasi Pancasila. Penelitian ini berfokus pada pengumpulan data dari berbagai artikel ilmiah yang relevan dan sudah dipublikasi pada google scholar. Dari hasil pencarian, ditemukan sebanyak 100 artikel yang diterbitkan diantara 2020 – 2025. Kemudian dilakukan proses penyortiran dari 100 artikel menjadi 50 artikel, karena berbagai hal yang terjadi diantaranya keterbatasan akses dan adanya ketidak relevannya yang tidak membahas secara spesifik tentang demokrasi Pancasila. Dengan demikian hanya didapatkan 5 artikel yang akan dianalisis lebih lanjut dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Mohammad Hatta mengenai demokrasi di Indonesia didasarkan pada keyakinan bahwa bangsa ini memiliki karakter demokratis yang berakar dalam kehidupan masyarakat. Dalam pandangan Hatta, terdapat tiga sumber utama yang menjwai cita-cita demokrasi bangsa Indonesia terutama dalam pemikiran tokoh pergerakan. Pertama, tradisi kolektivisme yang tercermin dalam permusyawaratan desa. Kedua, ajaran Islam yang menekankan kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Ketiga, gagasan para sosialis Barat yang menarik perhatian para pemimpin pergerakan kebangsaan karena memperjuangkan dasar-dasar kemanusiaan (Latif, 2021:364).

Pengalaman Mohammad Hatta mengenai tradisi demokrasi Eropa adalah pengamatannya terhadap praktik sosio-demokrasi di negara-negara Sandinavia selama studinya di Belanda, serta pemahamannya terhadap tradisi permusyawaratan dan gotong royong masyarakat desa-terutama konsep Nagari di Sumatra Barat-memberikan latar belakang yang kuat dalam mengkonseptualisasikan model demokrasi yang sesuai untuk Indonesia. Dalam demokrasi kita (1966:22), Hatta menjelaskan bahwa pengalaman dengan pemerintah otkrasi kolonial dalam bentuk negara-polisi menumbuhkan cita-cita negara hukum yang demokratis di kalangan pemimpin dan rakyat Indonesia. Negara yang dicita-citakan berbentuk republik berdasarkan kedaulatan rakyat. Namun, konsepsi kedaulatan rakyat yang dipahami dan dipropagandakan dalam pergerakan nasional berbeda dengan individualisme Rousseau. Kedaulatan rakyat Indonesia harus berakar kepada hal yang bercorak kolektivisme, sebagai perkembangan dari demokrasi asli Indonesia. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai respons terhadap imperialisme dan kapitalisme Barat juga memperkuat keinginan untuk mencari landasan negara nasional dalam

masyarakat sehingga demokrasi Barat secara a priori ditolak.

Hatta menyatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat yaitu kekuasaan untuk mengatur negara berada di tangan rakyat merupakan proses utama dalam proses demokrasi. Kekuasaan yang semula berada ditangan raja dan penjajah harus segera beralih ke tangan rakyat. Melalui prinsip kedaulatan rakyat, masyarakat tidak lagi ditentukan oleh kekuatan di luar dari dirinya, melainkan menjadi menentu terhadap nasibnya sendiri melalui mandat yang diberikan secara langsung maupun perwakilan. Demokrasi yang diusung oleh Mohammad Hatta berakar pada kedaulatan rakyat yang bersifat bottom-up. Artinya, pemerintah harus direpresentasikan mulai dari tingkat desa hingga ke pusat, di mana keputusan diambil melalui musyawarah dan kesepakatan (Fuad, 2014).

Hatta menekankan pentingnya prinsip musyawarah-mufakat untuk mencegah dominasi individu atau golongan tertentu dalam pengambilan keputusan serta menjamin bahwa keputusan politik senantiasa berorientasi pada keadilan sosial dan kepentingan umum. Karakter masyarakat Indonesia yang kolektivitas memberikan landasan budaya politik yang baik bagi praktik demokrasi permusyawaratan. Hatta menjelaskan bahwa mekanisme permusyawaratan dapat dilakukan secara langsung dengan melibatkan seluruh warga desa dalam suatu wilayah atau secara tidak langsung melalui perwakilan. Kekuasaan tertinggi dalam kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dengan disertai tanggung jawab yang harus diemban oleh pemegang kekuasaan. Hatta menyimpulkan bahwa masyarakat Indonesia tidak menganut paham individualisme seperti masyarakat barat. Maka dari itu, demokrasi yang dikembangkan di Indonesia hendaknya bukan sekedar menjiplak budaya masyarakat lain, melainkan demokrasi kekeluargaan yang berlandaskan permusyawaratan.

Demokrasi Pancasila memiliki ciri khas berupa pengampilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta pengelolaan pemerintahan berdasarkan konstitusi. Sistem ini tidak mengadopsi dominasi mayoritas atau minoritas melainkan berupaya mencapai keselarasan dalam keberagaman. Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat (Abufatih & Alba, 2024)

Implementasi demokrasi Pancasila di Indonesia mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengungkapkan bahwa proses demokrasi di Indonesia perlu dievaluasi karena adanya penurunan etika penyelenggaraan negara dan masalah dalam perumusan

regulasi yang menghambat pelaksanaan demokrasi secara efektif. Selain itu, fenomena politik identitas yang semakin meningkat juga berkontribusi terhadap kemunduran demokrasi pancasila dibuktikan dengan banyaknya kepentingan pribadi atau kelompok tertentu yang sering kali mengalahkan kepentingan umum dan menciptakan ketidakadilan dalam kekuasaan (Amelta et al., 2024).

Rendahnya kualitas pendidikan politik di kalangan masyarakat Indonesia juga membuat pemahaman mengenai demokrasi menjadi terbatas. Hal ini berakibat pada kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Dalam era digital penyebaran informasi yang tidak akurat semakin memperburuk situasi, merusak proses demokratis dan memicu polarisasi sosial. Banyak masyarakat Indonesia terjebak dalam informasi yang menyesatkan, sehingga sulit untuk membuat keputusan yang informasional dalam konteks politik (Nurrohman et al., 2024).

Tabel 1 Rangkuman Hasil Literatur Ruvieu

JUDUL	PENULIS	HASIL
Politik Dinasti dan Ancaman terhadap Demokrasi Pancasila	(Pane, 2024)	politik dinasti tidak sejalan dengan cita-cita demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat, dan dianggap lebih cocok diaplikasikan dalam sistem pemerintahan monarki. Politik dinasti juga mengancam keadilan, kualitas pemerintahan, serta menghalangi munculnya pemimpin berkualitas dari kalangan rakyat
Demokrasi Pancasila: Konsep dan implementasi di Indonesia	(Rohim et al., 2023)	Penelitian ini mengidentifikasi tantangan seperti politik uang, pendidikan politik yang kurang optimal dan dinasti politik sebagai hambatan bagi demokrasi yang substantif di Indonesia
Tantangan terhadap Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Digital	(Mudrikah et al., 2024)	Hasil penelitian menunjukan bahwa era digital seperti penyebaran berita palsu dan polarisasi opini publik yang dapat

		merusak keutuhan proses demokrasi Pancasila
Pengaruh Politik Identitas Terhadap Demokrasi di Indonesia	(I Putu Sastra Wingarta et al., 2021)	Penelitian ini mengungkapkan bahwa identitas politik menciptakan ketegangan sosial dan mengurangi ruang dialogis dalam masyarakat. Hal ini dapat mengancam landasan persatuan dan kesatuan serta kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi
Dampak Dinasti Politik terhadap Culture Demokrasi Pancasila di Indonesia	(Khalib Gadafi & Sasmi Nelwati, 2024)	Dinasti politik mengurangi kedaulatan rakyat karena mempersempit kesempatan bagi warga untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan keinginan mereka. Akses terhadap kekuasaan dan sumber daya menjadi terbatas hanya untuk kelompok elit. Hal ini mengancam integritas demokrasi Pancasila, yang menekankan pentingnya partisipasi rakyat dan keadilan

Politik Dinasti dan Ancaman terhadap demokrasi Pancasila

Politik dinasti merupakan upaya untuk mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam posisi politik. Saat Indonesia baru merdeka, praktik ini sudah dirasakan masyarakat hingga akhir masa Orde Baru, misalnya ketika Soeharto mengangkat putrinya, Siti Hardayanti Rukmana (Tutut), sebagai Menteri Sosial dalam Kabinet Pembangunan VII menjelang krisis 1998.

Memasuki era reformasi, politik dinasti semakin marak di tingkat daerah, terutama setelah pemilu 2005. Padahal, demokrasi Pancasila mengedepankan prinsip-prinsip seperti kebebasan dan kesetaraan (*freedom/equality*),

kedaulatan rakyat (people's sovereignty), serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dinasti Politik di Indonesia telah terbukti menjadi ancaman terhadap keutuhan demokrasi Pancasila. Penelitian oleh Pane (2024) mengungkapkan bahwa praktik politik ini membatasi kebebasan berpendapat dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam ruang publik. Dinasti politik menciptakan situasi dimana kekuasaan terbatas pada segelintir keluarga atau kelompok tertentu yang berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam akses kekuasaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi pancasila yang seharusnya menjunjung tinggi partisipasi rakyat secara adil dan merata.

Dinasti politik di Indonesia menjadi salah satu ancaman nyata terhadap prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila. Fenomena ini memperkuat kesenjangan dalam akses politik dan memberikan keunggulan yang tidak adil bagi keluarga-keluarga tertentu. Akibatnya, kandidat dari luar lingkaran kekuasaan tersebut sering kali tidak memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara sehat. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan sosial dan memperlebar jurang kesenjangan, yang jelas bertentangan dengan nilai keadilan sosial dalam Pancasila.

Dominasi keluarga dalam dunia politik sering kali melemahkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Mekanisme pengawasan publik yang seharusnya menjadi pilar dalam pemerintahan yang bersih dan responsif pun menjadi terhambat. Risiko munculnya oligarki dan tirani pun meningkat, karena kekuasaan berpusat hanya pada segelintir orang yang cenderung mengabaikan kepentingan rakyat secara luas.

Fenomena ini juga membatasi regenerasi kepemimpinan. Kesempatan bagi calon-calon independen atau generasi muda untuk tampil dan berkontribusi dalam politik menjadi sangat terbatas. Jika dibiarkan, dinasti politik dapat menggerus fondasi demokrasi yang sejatinya bertumpu pada partisipasi rakyat melalui musyawarah dan mufakat. Prinsip keadilan dan persamaan hak yang menjadi roh Demokrasi Pancasila pun terancam (Dinasti et al., 2025)

Praktik politik dinasti tidak hanya merugikan aspek kedaulatan rakyat tetapi juga mengganggu keadilan sosial. Pancasila menekankan setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam proses politik. Namun, dominasi keluarga dalam politik dapat menyebabkan terjadinya praktik nepotisme dan kolusi, dimana individu-individu yang tidak memenuhi syarat atau kualifikasi mendapatkan posisi penting hanya karena hubungan keluarga. Fenomena ini menciptakan integritas dan akuntabilitas pemerintah dipertanyakan karena keputusan-keputusan yang diambil cenderung

mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan umum.

Demokrasi Pancasila mengharapkan adanya persaingan yang adil dimana berbagai ide dan program dapat dipertimbangkan untuk kesejahteraan bersama. Ketika kekuasaan dikuasai oleh dinasti tertentu, ruang bagi kandidat-kandidat dari luar lingkaran menjadi sangat terbatas. Hal ini tidak hanya mengurangi pilihan politik bagi rakyat tetapi juga menciptakan regenerasi kepemimpinan yang diperlukan untuk kemajuan demokrasi. Walaupun secara hukum tidak melanggar aturan, keberadaan dinasti politik menghambat substansi demokrasi. Praktik ini menyebabkan stagnasi kepemimpinan dan mengurangi partisipasi publik, yang seharusnya didasarkan pada prinsip meritokrasi, bukan pada nepotisme (Dona, 2022).

Praktik Politik Uang

Praktik politik uang di Indonesia terjadi secara sukarela, di mana masyarakat menerima uang atau barang dari kandidat tanpa paksaan, dan sering kali dianggap sebagai hal yang wajar. Masyarakat yang terlibat dalam praktik ini menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, namun tetap melakukannya karena kondisi ekonomi yang sulit. Fenomena ini menunjukkan buruknya kualitas demokrasi di Indonesia dan telah menjadi kebiasaan yang sulit dihilangkan.

Faktor utama yang menyebabkan diterimanya politik uang di Indonesia antara lain kondisi ekonomi yang buruk, kesadaran politik yang rendah, dan pengetahuan politik serta pendidikan yang tidak memadai di kalangan masyarakat. Banyak orang menerima politik uang karena kebutuhan ekonomi dasar mereka dan keyakinan bahwa menolak tawaran uang adalah tindakan yang tidak baik. Penerimaan ini semakin diperkuat oleh norma budaya yang memandang praktik semacam itu sebagai hal yang lumrah selama pemilu.

Dimensi 'In Order To Motive' penting dalam memahami politik uang selama pemilu karena menyoroti alasan pemilih menerima uang, terutama untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan dasar mereka. Dimensi ini mengungkapkan bahwa pemilih sering kali memandang penerimaan uang sebagai solusi praktis untuk tantangan ekonomi mereka, yang menunjukkan pola pikir transaksional. Dimensi ini menggarisbawahi dampak kondisi ekonomi terhadap perilaku elektoral dan implikasinya terhadap kualitas demokrasi (Daniel et al., 2024).

Politik uang tidak hanya merusak integritas pemilu, tetapi juga mengancam prinsip ke-lima dalam pancasila yaitu keadilan sosial. Politik uang menciptakan ketidakadilan dalam proses demokrasi. Calon pemimpin yang seharusnya dipilih berdasarkan kapabilitas dan

integritas justru digantikan oleh mereka yang tidak mampu memberikan keseimbangan materi. Tidak bisa dipungkiri bahwa politik uang dapat meningkatkan popularitas seorang calon. Hal ini disebabkan oleh pandangan masyarakat yang cenderung membenarkan pencalonan seseorang sebagai wakil rakyat hanya karena kekayaan yang dimilikinya, dibandingkan dengan calon yang memiliki keterbatasan modal politik (Muten Nuna 2019). Prinsip kejujuran dan keadilan (jurdil) serta asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (luber) dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sering kali hanya menjadi slogan semata. Praktik politik uang (money politics) telah menjadi bagian sistemik dari proses demokrasi di Indonesia. Fenomena ini dilakukan secara masif oleh para calon, juru kampanye (jurkam), maupun tim sukses sebagai strategi untuk menarik perhatian serta mengamankan suara pemilih demi meraih kemenangan.

Praktik semacam ini tetap berlangsung meskipun beberapa partai politik mengklaim berlandaskan nilai-nilai Islam, bahkan ketika dikemas dengan cara yang tampak sah dan tertata. Meskipun demikian, tidak semua partai terlibat dalam praktik politik uang; terdapat pula partai yang konsisten menjaga integritas dalam proses demokrasi. Penyebaran politik uang memiliki dampak serius terhadap kehidupan demokrasi, karena menggeser makna kedaulatan dari rakyat ke tangan pemilik modal. Akibatnya, kekuasaan tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat mayoritas, melainkan ditentukan oleh kekuatan uang, baik dari dalam negeri maupun dari luar.

Penegakan hukum terhadap praktik politik uang di Indonesia masih lemah, baik dari segi implementasi maupun pengawasan. Kondisi ini menyebabkan praktik politik uang terus berlangsung tanpa efek jera yang berarti. Sebaliknya, Singapura menerapkan kerangka hukum yang ketat, disertai dengan pengawasan yang efektif dan sanksi yang tegas bagi para pelanggar. Akibatnya, kasus politik uang di negara tersebut relatif jarang terjadi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam memerangi korupsi politik sangat bergantung pada kekuatan regulasi serta efektivitas mekanisme penegakan hukumnya (Hanafi, 2024)

Kondisi Pendidikan Politik di Indonesia

Kondisi pendidikan politik di Indonesia cukup kompleks dan mencakup berbagai aspek. Salah satu kendalanya adalah terbatasnya waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan pendidikan politik. Biasanya, kegiatan ini hanya diselenggarakan menjelang momen tertentu seperti pemilihan umum. Akibatnya, proses pendidikan politik menjadi tidak berkelanjutan dan kurang menyentuh seluruh aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Selain itu, banyak kegiatan pendidikan politik yang disajikan secara terlalu formal dan kurang menarik. Hal ini membuat masyarakat, terutama generasi muda, menjadi enggan untuk mengikuti atau terlibat secara aktif. Di sisi lain, penyebaran informasi politik melalui media massa juga belum merata. Masih banyak kelompok masyarakat, khususnya yang berada di sektor informal dan daerah terpencil, yang sulit mengakses informasi politik karena keterbatasan infrastruktur dan teknologi.

Forum-forum resmi seperti rapat dengar pendapat dan konsultasi publik juga belum sepenuhnya menjangkau masyarakat umum, terutama mereka yang berasal dari kalangan bawah. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik masih sangat terbatas. Di lingkungan pendidikan formal, pendidikan politik pun belum terintegrasi secara optimal ke dalam kurikulum. Hal ini menyebabkan pemahaman masyarakat terhadap dunia politik masih rendah dan tidak merata.

Banyak pula masyarakat yang menganggap pendidikan politik hanya sebagai formalitas tanpa manfaat langsung. Pandangan ini membuat mereka tidak termotivasi untuk mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan politik, apalagi memahami pentingnya peran politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, pendalaman terhadap empat pilar kebangsaan yang seharusnya menjadi bagian penting dari pendidikan politik masih terbatas pada kalangan partai politik, belum menjangkau masyarakat secara luas (Ahmad, 2024)

Pendidikan politik di Indonesia yang masih kurang optimal juga menjadi hambatan bagi partisipasi rakyat. Banyak warga negara yang tidak memiliki pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Kurangnya literasi politik ini menyebabkan rendahnya kualitas partisipasi masyarakat dalam proses demokratis, sehingga mengurangi efektivitas sistem pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Pemahaman yang lemah mengenai demokrasi menyebabkan masyarakat cenderung apatis dan tidak berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan suara mereka tidak terdengar dan kebutuhan mereka terabaikan.

Era Digital dan Dampaknya terhadap Demokrasi Pancasila

Penelitian yang dilakukan oleh Mudrikah dkk (2024) menunjukkan bahwa penyebaran berita palsu (*hoaks*) dan polarisasi opini publik menjadi tantangan yang dapat merusak keutuhan proses demokrasi. Kemudahan akses informasi melalui teknologi digital khususnya media sosial menjadikan masyarakat cepat menerima dan menyebarkan informasi yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik yang dapat menurunkan kualitas diskusi publik. Penyebaran berita hoaks di media sosial

sering kali digunakan oleh pihak-pihak tertentu dalam manipulasi opini publik demi kepentingan politik tertentu.

Fenomena ini tidak hanya mengancam integritas proses pemilu, tetapi juga menciptakan fragmentasi sosial di tengah masyarakat. Polarisasi opini publik yang dihasilkan dari paparan bias atau tidak akurat dapat memicu konflik sosial dan meningkatkan semangat persatuan yang menjadi inti dari informasi nilai-nilai Pancasila. Ruang dialogis yang seharusnya menjadi wadah untuk musyawarah mufakat justru digantikan dengan emosi yang tidak sehat. Gelembung informasi atau filter bubble menghadirkan algoritma media sosial menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi pengguna. Akibatnya, masyarakat hanya terpapar pada sudut pandang tertentu tanpa mendapatkan perspektif lain yang beragam. Kondisi ini menyoroti ruang diskusi dan menghambat terciptanya pemahaman bersama atas isu-isu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di era modern yang didominasi oleh kemajuan teknologi digital, demokrasi sering dianggap sebagai sistem paling ideal untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Namun, dalam praktiknya, demokrasi digital kerap disalahgunakan, misalnya melalui maraknya perundungan (bullying) dan ujaran kebencian di media sosial yang bersifat merusak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik di era digital harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Demokrasi digital untuk mewujudkan pemerintahan yang baik harus mengedepankan konsensus dan keterwakilan sebagai kearifan lokal, berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, mempersatukan Indonesia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan demikian, demokrasi digital perlu diarahkan agar tidak hanya memenuhi prinsip kebebasan, tetapi juga menjaga etika dan nilai-nilai luhur bangsa.

Pengaruh Identitas Politik terhadap Ketegangan Sosial

Identitas politik adalah kondisi psikologis yang mencerminkan perasaan kedekatan individu terhadap suatu partai politik tertentu. Identitas ini mencakup dukungan, loyalitas, dan identifikasi yang dapat mempengaruhi keputusan politik serta pemungutan suara. Proses sosialisasi politik, yang terjadi di lingkungan keluarga, tempat kerja, dan komunitas, berperan penting dalam membentuk identitas politik individu. Melalui sosialisasi ini, individu membangun pandangan, nilai, dan norma yang mendukung afiliasi mereka dengan partai politik (Jalil, 2020).

Girsang dkk mengungkapkan bahwa politik identitas menciptakan ketegangan sosial yang dapat mengurangi ruang dialogis dalam masyarakat. Ketegangan ini berpotensi mengurangi ruang dialogis dalam masyarakat. Ketegangan ini berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Dalam politik Indonesia yang kaya akan etnis, agama, dan budaya, identitas politik menjadi sasaran bagi politisi sebagai alat untuk memobilisasi dukungan. Strategi ini dapat menimbulkan resiko yaitu perbedaan identitas dapat menjadi sumber konflik dengan dalih kekuatan persatuan.

Politik identitas berfungsi dengan cara memposisikan kelompok tertentu sebagai “pihak yang terpinggirkan” atau “pihak yang perlu diperjuangkan” sehingga menciptakan garis pembatas antara “kami” dan “mereka”. Hal ini tidak hanya menimbulkan polarisasi sosial tetapi juga menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Ketika satu kelompok merasa terancam atau terpinggirkan mereka akan bereaksi secara defensif yang memicu ketegangan bahkan kekerasan. Kasus seperti ini sering kali berujung pada stigmatisasi yang berkepanjangan dan menghalangi upaya membangun solidaritas Nasional.

Politik identitas dapat mengalihkan perhatian masyarakat terhadap isu-isu yang lebih penting dan mendesak seperti, kemiskinan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Politisi yang mengandalkan politik identitas cenderung lebih fokus pada retorika yang membedakan antar kelompok daripada menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Akibatnya, hubungan antar kelompok dalam masyarakat menjadi terhambat dan potensi untuk mencapai kesepakatan bersama semakin melemah.

Politik identitas di Indonesia sebenarnya sudah lama dimanfaatkan oleh elite politik sebagai strategi untuk mendiskreditkan lawan politik yang dianggap berpotensi menang. Taktik ini melibatkan penciptaan narasi yang menanamkan rasa kebencian dan menuduh lawan politik tidak nasionalis serta intoleran. Pada dasarnya, politik identitas tak terhindarkan bagi politikus Indonesia. Sebab, setiap aktivitas politik memerlukan media penyalur, dan identitas seperti suku, ras, agama, budaya, gender, serta kelompok sosial sering kali menjadi 'kendaraan' tersebut (Zakiah et al., 2024).

Perkembangan politik identitas dalam masyarakat Indonesia yang plural mengandung potensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan analisis terhadap berbagai pendekatan penanganan yang tidak sekadar bersifat represif. Pendekatan yang menekan justru gagal

menyentuh akar permasalahan, yaitu kebutuhan dasar manusia untuk memperoleh pengakuan atas harkat dan martabatnya secara terbuka (isothymia). Tindakan represif cenderung membangkitkan kembali ingatan kolektif tentang pengalaman ketertindasan di masa lalu, sehingga memperkuat semangat perlawanan berbasis identitas. Ketika politik identitas tumbuh dari kelompok mayoritas berdasarkan agama atau suku, risikonya semakin tinggi untuk berkembang menjadi tuntutan akan pengakuan sebagai kelompok paling unggul dan paling benar (megalothymia), yang justru memperlebar jurang perpecahan dalam kehidupan berbangsa. (Supratikno et al., 2023)

Demokrasi Harus Bersumber pada Pancasila

Pancasila merupakan dasar negara dan ideologi nasional Indonesia, yang membawa konsekuensi bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai landasan fundamental dalam penyelenggaraan negara. Pancasila terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang fundamental, yaitu: (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, (3) Persatuan Indonesia, (4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan (5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai sumber nilai moral dan etika bagi masyarakat Indonesia

Menurut A.G. Pringgodigdo Pancasila telah ada sejak adanya Negara Indonesia. Pancasila memiliki ciri khas yang tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pembeda antara Bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Sedangkan menurut Frierich Carl von Savigny, setiap bangsa memiliki vulgeist (jiwa bangsa/jiwa rakyat) masing-masing, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia lahirnya Pancasila bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia (Unggul et al. 2020).

Negara Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan politik. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip Pancasila, Indonesia menerapkan sistem yang inklusif. Pemilihan umum yang diadakan secara rutin memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih wakilnya dan menyampaikan aspirasi mereka. Demokrasi di Indonesia mengutamakan musyawarah dan mufakat, menghormati perbedaan, serta mempertimbangkan kepentingan bersama. Walaupun dihadapkan pada tantangan seperti politik identitas dan polarisasi sosial, semangat demokrasi terus berkembang. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga persatuan serta menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Demokrasi Pancasila merupakan sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia, berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Sistem ini mengedepankan kebijaksanaan yang diperoleh melalui musyawarah dan perwakilan. Inti dari Demokrasi Pancasila adalah kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan politik berpulang kepada rakyat dan ditujukan untuk kepentingan serta kesejahteraan masyarakat

Setiap sila dalam Pancasila memiliki kedudukan yang setara dan saling berkaitan. Dalam praktiknya, Demokrasi Pancasila mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik, melalui pemilihan umum yang bebas dan adil serta mekanisme konsultasi publik. Semuanya bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang mencerminkan aspirasi seluruh rakyat Indonesia (Haifarashin and Anggraeni Dewi 2022).

Pancasila juga memainkan peran dalam mengatasi isu-isu sosial dan ekonomi, dengan menekankan pentingnya keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat dari budaya gotong royong dan musyawarah, yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Namun, tantangan dalam penerapan prinsip-prinsip Pancasila masih memerlukan perhatian, terutama di era modern yang seringkali lebih mengedepankan individualisme dan mengabaikan kesadaran kolektif.

PENUTUP

Simpulan

ami menemukan bahwa pandangan Muhammad Hatta mengenai Demokrasi Pancasila masih sangat relevan dalam konteks Indonesia saat ini. Implementasi prinsip-prinsip Pancasila menghadapi berbagai tantangan, termasuk politik dinasti, praktik politik uang, dan rendahnya tingkat pendidikan politik di kalangan masyarakat. Selain itu, pengaruh politik identitas dapat mengancam persatuan bangsa dan kualitas demokrasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang lebih serius untuk mengembalikan esensi demokrasi yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Melalui refleksi terhadap nilai-nilai Hatta dan penerapan prinsip-prinsip Pancasila secara konsisten, diharapkan Demokrasi Pancasila dapat kembali menjadi fondasi yang kuat bagi stabilitas politik dan keharmonisan sosial di Indonesia. Dengan mendorong partisipasi aktif masyarakat dan edukasi politik yang lebih baik, kita dapat menciptakan sistem demokrasi yang lebih sehat dan berkelanjutan

Saran

Beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan implementasi Demokrasi Pancasila di Indonesia.

1. **Reaktualisasi Gagasan Hatta**
Pemerintah dan institusi pendidikan perlu mengintegrasikan pemikiran Mohammad Hatta tentang demokrasi Pancasila ke dalam kurikulum kewarganegaraan dan pendidikan politik untuk membangun kesadaran kritis generasi muda.
2. **Penguatan Literasi Digital dan Politik**
Masyarakat perlu dibekali dengan kemampuan literasi digital dan literasi politik agar mampu menyaring informasi, menolak ujaran kebencian, serta aktif dalam partisipasi politik yang sehat dan beretika.
3. **Pencegahan Politik Dinasti dan Praktik Oligarki**
Reformasi sistem pemilihan umum dan penguatan partai politik berbasis kaderisasi meritokratik harus menjadi agenda prioritas untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh segelintir elite dan keluarganya.
4. **Revitalisasi Forum Musyawarah**
Praktik musyawarah sebagai elemen khas demokrasi Pancasila perlu diperkuat di berbagai tingkat pengambilan keputusan, dari lingkup komunitas hingga kebijakan publik nasional, agar aspirasi rakyat benar-benar menjadi pijakan utama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abufatih, T. and Alba, S. (2024) 'Dismantling Political Dynasties: Transformation of Pancasila Democracy in the Context of Family', 9(August), pp. 86–105. Available at: <https://doi.org/10.15294/ipsr.v9i2.4655>.
- Ahmad, A. (2024). *PUBLIK MELALUI PENDIDIKAN FORMAL (Optimizing The Role of Political Education to Increase Public Participation Through Formal Education)*. 54.
- Ahmad Budiman, Debora Sanur Lindawaty, P. dan S.C.D. (2019) *Demokratisasi Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia*.
- Amelta, C. *et al.* (2024) 'Issn 3031-0369', 8(1).
- Asiva Noor Rachmayani (2015) 'No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析 Title', p. 6.
- Atmaja, H.D.S. *et al.* (2023) 'Hakikat Demokrasi Dalam Pandangan Islam', (12001091).
- Daniel, R., Simatupang, P., Atthahara, H., & Adiarsa, S. R. (2024). *POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN UMUM STUDI FENOMENOLOGI PRAKTIK POLITIK UANG PADA PEMILU TAHUN. 6*, 12335–12340.
- Dinasti, P., Tantangan, D. A. N., & Kajian, D. (2025). *FILOSOFIS MACHIAVELLI DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG ADIL DI INDONESIA Jurnal JISIPOL. 9*.
- Dona, F. (2022) 'Dinasti Politik di Era Otonomi Daerah Dalam Perspektif Demokrasi', *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 7(2), pp. 123–145. Available at: <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i2.6254>.
- Elizamiharti, E. and Nelfira, N. (2023) 'Demokrasi Di Era Digital: Tantangan Dan Peluang Dalam Partisipasi Politik', *Jurnal Riset Multidisiplin dan Inovasi Teknologi*, 2(01), pp. 61–72. Available at: <https://doi.org/10.59653/jimat.v2i01.342>.
- Fadlail, A. (2024) 'Demokrasi Pancasila: Landasan Nilai Dan Prinsipnya Dalam Membangun Sistem Dan Etika Politik Indonesia', 3(1).
- Fuad, A.B.B. (2014) 'Political Identity and Election in Indonesian Democracy: A Case Study in Karang Pandan Village – Malang, Indonesia', *Procedia Environmental Sciences*, 20, pp. 477–485. Available at: <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2014.03.060>.
- Hamidah, K. (2018). The Trend of Emerging Identity Politics in Indonesia and the Challenge in Fostering Social Cohesion: Lesson Learned from Jakarta Provincial Election. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 26(1), 91. <https://doi.org/10.19105/karsa.v26i1.1653>
- Hanafi, I. (2024). *Tantangan Penegakan Hukum terhadap Politik Uang di Indonesia: Studi Kasus dan Perspektif Internasional. 1*(2), 122–131.
- Hrp, N.B. *et al.* (2025) 'Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Implementasi Pancasila Sebagai Pilar Demokrasi (Studi Kasus Jalan Jagung, Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan)', 3(3), pp. 952–959.
- Hukum, D. *et al.* (2025) 'Politik Dinasti dan Pembaruan Sistem Demokrasi di Indonesia Firdaus Arifin * PENDAHULUAN Fenomena politik dinasti di Indonesia semakin menjadi perhatian, terutama dalam konteks pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah Daerah. Istilah 'politik dinast', 31(December 2024), pp. 636–665.
- I Putu Sastra Wingarta *et al.* (2021) 'Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia', *Jurnal Lemhannas RI*, 9(4), pp. 117–124. Available at: <https://doi.org/10.55960/jlri.v9i4.419>.
- Jalil, M. (2020) 'The essence of muhammad hatta's democracy: The relevance to the development of regional autonomy', *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(4), pp. 1631–1638.
- Khalib Gadafi and Sasmi Nelwati (2024) 'Dampak Dinasti Politik Terhadap Culture Demokrasi Pancasila di Indonesia', *Journal Innovation In Education*, 2(3), pp. 133–148. Available at: <https://doi.org/10.59841/inoved.v2i3.1384>.
- Maydani, R. *et al.* (2024) 'Politik Dinasti di Negara Demokrasi', *Jurnal Syntax Admiration*, 5(3), pp. 950–955. Available at: <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i3.1075>.

- Mudrikah, A. et al. (2024) 'Tantangan Terhadap Pelaksanaan Demokrasi Pancasila di Era Digital', 4.
- Muten Nuna, R. M. M. (2019). *Kebebasan Hak Sosial-Politik Dan Partisipasi Independency of Social-Political Rights and Participation of Citizen in Democratic System in. Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 110–124.
- Nurrohman, R. et al. (2024) 'Analisis Permasalahan Penerapan Demokrasi dan Prospek Perbaikannya di Indonesia', 1(1), pp. 11–20.
- Pane, I. (2024) 'Politik Dinasti Ancaman terhadap Demokrasi Pancasila PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum PERFECTO: Jurnal Ilmu Hukum', 02(1), pp. 13–24. Available at: Pendahuluan, I. (2016). *Machine Translated by Google Pembangunan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Era Demokrasi Digital Berbasis Pancasila Nilai Di Indonesia*. 7(186), 272–279. <https://doi.org/10.32884/jih.v2i1.1643>.
- Rochman, S. et al. (2022) 'Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum Ums 2022 Demokrasi Desa Menurut Mohammad Hatta: Gagasan Pemilu Kerakyatan Di Indonesia', pp. 50–61.
- Rohim, M. et al. (2023) 'Demokrasi Pancasila: Konsep Dan Implementasi Di Indonesia', *Advanced In Social Humanities Research*, 1(5), p. 664.
- Siregar, W.M. et al. (2024) 'MEMBANGUN DEMOKRASI INDONESIA YANG BERLANDASKAN PANCASILA DI ERA DIGITAL BUILDING INDONESIAN DEMOCRACY BASED ON PANCASILA IN THE', (November), pp. 9073–9080.
- Suftyadi, A.R. (2021) 'Pelaksanaan Praktik Politik Oligarki Dalam Penegakan Negara Hukum Demokrasi', pp. 1–110. Available at: <https://lib-pasca.unpak.ac.id/index.php?p=fstream-pdf&fid=2617&bid=14726>.
- Supratikno, A., Teologi, F., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). *Politik Identitas Dikaji Dari Perspektif Sosio-Historis Pembentukan Identitas Nasional Indonesia. SAMI: Jurnal Sosial-Keagamaan Dan Teologi Di Indonesia*, 1(1), 1–21.
- Tutukansa, A.F. (2022) 'Maraknya Pengaruh Kompleks Politik Identitas Di Indonesia', *Khazanah: Jurnal Mahasiswa*, 14(1), pp. 20–30. Available at: <https://doi.org/10.20885/khazanah.vol14.iss1.art3>.
- Utami, R.P. and Umamah, N. (2024) 'Mohammad Hatta 's Views on Popular Democracy and Nationalism , 1945-1956', 8(7), pp. 109–114.
- Zakiah, A.M. et al. (2024) 'Pengaruh Politik Identitas dalam Kestabilan Ketatanegaraan di Indonesia', 04(2), pp. 180–193. Available at: <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.